



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

PANGKALAN PSDKP BENOA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

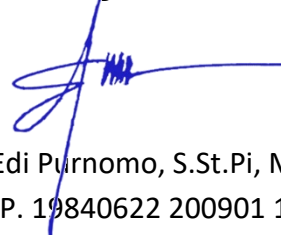
KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) pada Triwulan III Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) pada Triwulan III Tahun 2025.

LKj Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan III Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Pangkalan PSDKP Benoa dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Pangkalan PSDKP Benoa dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Denpasar, 13 Oktober 2025
Kepala Pangkalan PSDKP Benoa



Edi Purnomo, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19840622 200901 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan III Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2025 yang telah ditetapkan. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Pangkalan PSDKP Benoa kepada Ditjen. PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Pangkalan PSDKP Benoa telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Benoa menetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan, yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁹⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Seluruh indikator kinerja yang berjumlah 21 indikator telah tercapai sesuai target.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2025 sebesar Rp. 29.489.593.000,00. Realisasi anggaran hingga 31 September 2025 sebesar Rp. 21.590.822.906,00 dengan persentase 73,22%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	2
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa	2
E. Sistematika Penyajian Laporan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rancangan Pohon Kinerja Tahun 2025	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	6
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025	10
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	12
C. Akuntabilitas Keuangan.....	22
BAB IV PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Rekomendasi	23
LAMPIRAN	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan SDKP Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan SDKP 2025-2029.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Benoa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2025, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu actual yaitu efisiensi anggaran namun pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

- a. Banyaknya nelayan kapal ijin pusat yang tidak mengetahui bahwa kapal yang berada di bawah 12 mil laut adalah pelanggaran jalur penangkapan ikan;
- b. Cuaca buruk menyebabkan banyak kapal ijin pusat bergerak berlindung di bawah 12 mil laut sehingga menyebabkan banyaknya indikasi pelanggaran daerah atau jalur penangkapan ikan.
- c. Kapal dengan izin pusat belum mau memasang VMS
- d. Masih banyak kapal penangkap yang belum beizin

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Masih banyaknya usaha pemanfaatan ruang laut yang belum mengetahui teknis perijinan pemanfaatan ruang laut;
- b. Unit usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum memiliki dokumen perijinan.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Benoa mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan

7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Benoa membawahi 6 (enam) Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) yaitu sebagai berikut:

1. Satwas SDKP Lombok Timur;
2. Satwas SDKP Jembrana;
3. Satwas SDKP Banyuwangi;
4. Satwas SDKP Probolinggo;
5. Satwas SDKP Lamongan;
6. Satwas SDKP Surabaya.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Pangkalan PSDKP Benoa.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian Pangkalan PSDKP Benoa pada Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Benoa 2025-2029; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam dialog kinerja PSDKP Tahun 2025 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025.

A. Rancangan Pohon Kinerja Tahun 2025

Merujuk kepada Rancangan Pohon Kinerja Direktorat Jendral PSDKP tahun 2025 terdapat 2 sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Produktivitas Kelautan dan Perikanan dengan Indikator : Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan, dan Sasaran strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas. Dari sasaran strategis dan indikator tersebut tertuang 5 target untuk arah kebijakan Ditjen PSDKP yaitu:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
3. Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan;
5. Tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP.

Rancangan kinerja ini juga melihat dari pada Visi dan misi Ditjen PSDKP yang tertuang dan dijabarkan lagi pada Tingkat dibawahnya atau Unit kerja yaitu visi misi Pangkalan PSDKP Benoa, berikut visi misi tersebut :

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

Berikut pernyataan visi dan Misi pangkalan PSDKP Benoa :

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Pangkalan PSDKP Benoa serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pangkalan PSDKP Benoa, maka dirumuskan visi Pangkalan PSDKP Benoa yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Pangkalan PSDKP Benoa menuju terwujudnya visi Direktorat Jenderal PSDKP”

Sejalan dengan visi Pangkalan PSDKP Benoa, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa;

- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa.

2. Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pangkalan PSDKP Benoa dan merukan mandatori dari sasaran kinerja Ditjen PSDKP maka dirumuskan beberapa sasaran kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025. Sasaran yang dimaksud adalah turunan dari Ditjen PSDKP tahun 2025 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa, yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2025 telah menetapkan 8 sasaran kegiatan dan 21 Indikator Kinerja. Indikator Kinerja berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	75
		3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		7	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	81

		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa(Nilai)	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa(Indeks)	87
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Benoa(Nilai)	86
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa(%)	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa(Nilai)	88,5
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	80

		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Unit)	1
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Pangkalan PSDKP Benoa dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerja berbasis informasi teknologi dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

Dalam pengelolaan kinerja Pangkalan PSDKP Benoa telah menetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh Satu) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa pada Triwulan (TW) III sebesar 107,33 %, yang diperoleh dari capaian indikator kinerja sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa TW I Tahun 2025

	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82	-	-	-
2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	75	-	-	-
3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	75	-	-	-
4	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	100	100	100	100
5	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	100	100	100	100
6	Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92	-	-	-
7	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92	-	-	-
8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	-	-	-

	lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)				
9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	81	70	81	115,71
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	81	70	81	115,71
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	94	-	-	-
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	71,5	-	-	-
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa(Nilai)	92	-	-	-
14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa(Indeks)	81	74	83,48	112,81
15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Benoa(Nilai)	86	-	-	-
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa(%)	100	100	100	100
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100	105,26
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa(Nilai)	88,5	88,5	87,37	98,72

19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	80	-	-	-
20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Unit)	1	-	-	-
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan.

1. Indikator Kinerja 4. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan" dengan capaian 100%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Nilai Capaian IKU 4

Indikator Kinerja	Triwulan III Tahun 2024			Triwulan III Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%
Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Indeks)	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan III tahun 2025 realisasi nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 100. Capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya memiliki nilai yang sama 100 karena menggunakan perhitungan kualitas namun jika di bandingkan

jumlah kuantitas maka tahun lalu lebih banyak jumlah pengawasan, hal ini karena tahun 2025 masih masa peralihan renstra dan efisiensi anggaran.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan terdiri dari :

- a. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan;
- b. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan ruang laut;
- c. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- d. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- e. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Penentuan Nilai Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pencapaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah merupakan pencapaian dari pemeriksaan kegiatan pada tabel berikut Dimana semua insidentil dari laporan masyarakat, Kaskel, Pulau-Pulau Kecil dan tindak lanjut dari KKPPRL.

Tabel 3.4. Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

NO	Kegiatan	Triwulan III Tahun 2025	
		Jumlah Pelaku Usaha	Nilai
1	Pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan (ALSE, ekstraksi garam, wisata tirta)	5	100
2	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut	31	100
3	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	5	100
4	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional	0	0
5	Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	0	0
6	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil	23	100
7	Drager	0	0
8	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan BMKT	0	0
9	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang melakukan kegiatan Reklamasi	0	0
Jumlah		64	100

Pencapaian kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa telah sesuai dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan polsus PWP3K di Pangkalan PSDKP Benoa maupun di Satwas SDKP di bawah Pangkalan PSDKP Benoa. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan pokmaswas serta sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan melalui media sosial.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Benoa setelah blokir sebesar Rp. 137.163.000,-. Sampai dengan 30 Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 124.825.309,- atau 91,01%.

Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan

Pencapaian sasaran kegiatan " Terselenggaranya pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan" telah diidentifikasi dalam indikator kinerja "Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)".

2. Indikator Kinerja 5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)

Pencapaian indikator kinerja " Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)" tahun 2025 adalah 100 dari target sebesar 100. Capaian kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Nilai Capaian IKU 5 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2024			Triwulan I Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%
Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan III tahun 2025 realisasi nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 100. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena perbedaan indicator perhitungan indikator kinerja namun sama memiliki nilai 100 karena yang dihitung adalah kualitas bukan kuantitasnya, .

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan, serta pada tahun 2025 juga menghitung kualitas pengguna layanan SLO, HPKD.

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Penentuan Nilai Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Surat Penugasan Piket c. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; d. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau e. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan

2	a. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha, b. Pelaksaaan pelayanan kapal perikanan	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Penyusunan laporan, dan jumlah lembar pelayanan dari hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSPD	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pencapaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Pemeriksaan Kepatuhan Usaha Perikanan Pangkalan PSDKP Benoa

Kegiatan	Triwulan III Tahun 2025	
	Unit Usaha/kode proyek/Lembar	Nilai Penyelesaian
Pemeriksaan pelaku usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan berbasis risiko	0	100
Pemeriksaan pelaku usaha pembudidayaan ikan berbasis risiko	11	100
Pemeriksaan pelaku usaha pengolahan ikan berbasis risiko	4	100
Pemeriksaan pemasaran dan distribusi hasil perikanan berbasis risiko	4	100
Pemeriksaan budidaya program Prioritas Nasional	0	100
Pemeriksaan pelaku usaha LKR	0	100
Pengawasan Insidental	27	100
Pengawasan Importasi	2	100
Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi (JIL)	11	100
SLO	9468	100
HPK Berangkat	9845	100
HPK Datang	9210	100
Total	28,582	100

Berdasarkan tabel di atas, berikut pencapaian masing-masing kegiatan pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan berdasarkan wilayah kerja di Pangkalan PSDKP Benoa :

Pencapaian kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa telah sesuai dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa maupun di Satwas, dimana pengawas perikanan yang tersebar di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa berjumlah 55 orang. Keberhasilan pencapaian ini selain didukung dengan anggaran operasional dan sarana prasarana yang ada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa juga didukung dengan terjalinnya koordinasi yang baik Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa setelah blokir sebesar Rp. 109.839.000,-. Sampai dengan 31 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 80.590.374,- atau 73,37%.

Sasaran Kegiatan 7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : ¹⁾ Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks) dan ²⁾ Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks).

3. Indikator Kinerja 9. Indeks Pengenaan sangsi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)

Capaian indikator “ Indeks Pengenaan sangsi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)” pada triwulan III tahun 2025 sebesar 81 dari target yang ditetapkan 70. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan III Tahun 2024			Triwulan III Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%
Indeks Pengenaan sangsi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	60	80	120	70	81	115,71

4. Indikator Kinerja 10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)

Capaian indikator “ Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” pada triwulan III tahun 2025 sebesar 81 dari target yang ditetapkan 70. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja	Triwulan III Tahun 2024			Triwulan III Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%
Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	70	80	114,79	70	81	115,71

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan III tahun 2025 realisasi indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan ingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 81 dari yang ditargetkan sebesar 70. Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III tahun 2024 memiliki nilai yang lebih tinggi karena ini penyelesaian sanksi administratif sangat cepat dilaksanakan, sama halnya dengan IKU Indeks peneanaan sanksi administratif memiliki nilai yang lebih tinggi dari 2024 , walau keduanya dilihat dari target yang diberikan lebih tinggi, namun dalam perhitungan IKU sama yaitu 100 karena yang dinilai adalah kualitas penyelesaiannya.

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan indeks diperoleh dari jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa dibagi jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis pemantauan.

Pada triwulan III tahun 2025 di Pangkalan PSDKP Benoa terdapat 230 peneanaan sanksi administratif dan untuk SPKP terdapat 122 dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan dan yang telah diperiksa sebanyak 116 sudah orang/pelaku usaha dengan rincian 23 penggaran Pelabuhan pangkalan, 45 pelanggaran DPI, 32 pelanggaran jalur, Transshipment 3, zone konservasi 19. Sehingga diperoleh capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 81%. Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja Pengawas Perikanan dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 53 orang dan PPNS berjumlah 18 orang. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki PPNS Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait kasus-kasus yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait

Total PNBPN dari sanksi Administratif yaitu Rp. 875.704.204,- dengan rincian SDP Rp. 384.903.376,- dan SDK Rp. 490.800.828,-.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan dan Penanganan sanksi administratif” Pangkalan PSDKP Benoa setelah blokir sebesar Rp. 61,237,000,-. Sampai dengan 31 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 43,205,500,- atau 70.55%.

Kegiatan 5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran Kegiatan 8. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”, Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 14 indikator kinerja yaitu : ⁽¹⁾ Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa menggunakan penilaian mandiri Satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai); ⁽²⁾ Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen) ⁽³⁾ Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (nilai); ⁽⁴⁾ Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks); ⁽⁵⁾ Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai); ⁽⁶⁾ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen); ⁽⁷⁾ Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai); ⁽⁸⁾ Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi); ⁽⁹⁾ Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks); ⁽¹⁰⁾ Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen); ⁽¹¹⁾ Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen); ⁽¹²⁾ Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen); ⁽¹³⁾ Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai); ⁽¹⁴⁾ Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai). Capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP pada TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Triwulan III Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100	100	100
Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	0	0	0
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	95	100	105,26
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	88,5	87,37	98,72
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	0	0	0

5. Indikator Kinerja 13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Capaian indikator “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)” pada tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Capaian pada triwulan III tahun 2025 sama apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan III tahun 2024. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)

Indikator Kinerja	Triwulan III Tahun 2024			Triwulan III Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100	100	100	100	100	100

Penilaian risiko dilakukan melalui form penilaian risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/KEPMEN-KP/2024 Tentang Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Dari form pemantauan risiko Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2025 memiliki 4 rencana pengendalian risiko dan 4 realisasi pengendalian risiko, sehingga capaian persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup PSDKP Benoa adalah 100%. Tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pendampingan penyusunan manajemen risiko oleh Setditjen PSDKP serta rapat internal Pangkalan PSDKP Benoa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian yang bersifat rutin, berkala dan dengan pendekatan manajemen risiko.

6. Indikator Kinerja 18. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pangkalan PSDKP Benoa berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 Maret 2024 (TW I periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Hingga 31 September 2025. 11 (sebelas) rekomendasi telah ditindaklanjuti hingga tuntas dari 11 (sebelas) rekomendasi dalam LHP.

Capaian indikator kinerja ini pada triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan III tahun 2024 karena pada tahun 2024 indikator penyesaian dan rekomendasi juga berbeda, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sampai dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan III Tahun 2024			Triwulan III Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	120	95	100	105,26

Capaian indikator kinerja pada triwulan II tahun 2025 diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2024 yang berjumlah 11 rekomendasi dan sampai pada 31 September 2025 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan disampaikan adalah 11 rekomendasi sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 100 dari target yaitu 95 sehingga menjadi 105,26

7. Indikator Kinerja 19. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Benoa. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Benoa, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan III tahun 2025 adalah 87,37 dan telah memenuhi target sebesar 88,50 dengan capaian 98,72%. Nilai tersebut diperoleh karena pelayanan yang diberikan terhadap pengguna layanan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelayanan penerbitan SLO lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dilaksanakan pada beberapa satwas maupun wilker sebagai berikut :

1. Pangkalan PSDKP Benoa
2. Satwas SDKP Lombok Timur
3. Wilker SDKP Teluk Awang
4. Wilker SDKP Tanjung Luar
5. Wilker SDKP Sape
6. Satwas SDKP Jembrana
7. Satwas SDKP Banyuwangi
8. Wilker PP Masami
9. Wilker SDKP Tanjung Wangi
10. Satwas SDKP Probolinggo
11. Satwas SDKP Lamongan
12. Wilker SDKP Bulu
13. Wilker SDKP Gresik
14. Wilker SDKP Tuban

Tabel 3.13. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	Triwulan III Tahun 2024			Triwulan III Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	80	89,78	112,23	88,5	87,37	98,72

Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena di tahun ini ada 2 pelayanan yaitu pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal sehingga para pengguna jasa masih kebingungan dalam mengisi survey kepuasan masyarakatnya, Pangkalan PSDKP Benoa selalu mendampingi dan memberikan sosialisasi pada para pengguna layanan terhadap aplikasi yang baru diterapkan. Pangkalan PSDKP Benoa selalu berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para nelayan dan stakeholder.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2025 sebesar Rp. 29.489.593.000,-. Realisasi anggaran hingga 31 September 2025 sebesar Rp. 24.082.450.622,- dengan persentase 81,66% yang mana dihitung dari anggaran sisa dari blokir anggaran, untuk pagu menggunakan anggaran yang telah direvisi. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	15,414,810,000	11,415,772,036	74.06
2351	Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	61,237,000	43,205,500	70.55
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	267,507,000	212,931,133	79.60
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	13,746,039,000	12,410,541,953	90.28
TOTAL		29,489,593,000	24,082,450,622	81.66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan III tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan III tahun 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra dan Penilaian PK dituangkan dalam kinerja yang berkesinambungan.
2. Capaian kinerja Pangkalan PSDKP pada triwulan III tahun 2025 Secara keseluruhan dinyatakan berhasil dengan nilai kinerja organisasi mencapai 107.33 % dengan realisasi anggaran sebesar 81.66 % dari hitungan pasca efisiensi (Blokir).

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Benoa untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekomendasi Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan III Tahun 2025

NO	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Percepatan Penyerapan anggaran	Kegiatan yang dapat dilaksanakan	Realisasikan/dilaksanakan
2	Pengawasan SDK dan SDP	Dokumen sesuaikan dengan manual IKU	Penyesuaian laporan
3	Penanganan pelanggan	Data Dukung pada G. Drive	Perbaikan/merapikan data dukung



LAMPIRAN